**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari)**

**Dani Rachman**

**e-mail :** [**dani.rachman1993@gmail.com**](mailto:dani.rachman1993@gmail.com)

**Syifa Vidya Sofwan**

**e-mail :** [**vidyasofwan@yahoo.com**](mailto:vidyasofwan@yahoo.com)

**Siska Amelia**

**e-mail :** [siskaamelia3399@gmail.com](mailto:siskaamelia3399@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis F untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu seluruh Desa / Kelurahan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari sebanyak 11 desa / kelurahan, serta sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang diambil mulai dari pimpinan (kepala desa) sebagai pengambil kebijakan, sampai bawahan yang mengetahui dan terlibat langsung dengan variabel-variabel yang diteliti, maka dari 11 desa / kelurahan masing-masing diambil sampel sebanyak 5 orang, sehingga total sampel menjadi 55 responden.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara simultan dan parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan hasil Koefisien Determinasi sebesar 64,5% sedangkan sisanya sebesar 35,5% merupakan faktor lain di luar model penelitian ini.

**Kata kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan**

1. **PENDAHULUAN**

Fenomena yang terjadi di pemerintahan Desa yaitu masih terdapat Desa yang belum menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik Desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu permasalahan urgen dan dianggap dapat terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan adalah (1) kurangnya memahami pembukuan yang benar. (2) dikarenakan desa sekarang pengelolaannya menggunakan Sistem akuntansi desa atau disebut SISKEUDEUS sehingga pemerintah desa masih belum paham dalam bidang teknologi informasi informasi. (3) minimnya kapasitas pengetahuan akan pemahaman sistem keuangan desa dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa (tantangan integral), menggambarkan masih kurangnya peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada dalam suatu instansi pemerintahan desa. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi (SIA).

Berdasarkan rencana pembangunan Pemerintah Desa Kecamatan Arjasari tahun 2015-2021 dikemukakan bahwa salah satu isu strategis yang menjadi perhatian peneliti yaitu sudah dilaksanakannya penetapan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAPDesa tetapi masih belum optimal dalam penerapannya, serta rencana penggunaan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya mengikuti standar dan rawan manipulasi. sharing data dan informasi yang belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal. Selain itu, masih adanya penempatan SDM dimasing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian sehingga prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban masih dianggap rumit oleh aparatur pemerintah desa. Hal ini merupakan bukti dan gambaran mengenai tingkat kualitas dalam laporan keuangan pemerintah tersebut.

Dalam menyajikan suatu laporan keuangan desa tentunya harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mengacu pada PP Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggung jawaban keuangan Desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPD).

SAPDesa tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas karena informasi yang berkualitas bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat bila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang terdiri dari relavan (*relevance*), andal (*reability*), dan dapat dipahami (*understandability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah, pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel dan transparan sehingga dana desa dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga, sistem informasi akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah desa terutama dalam menjalankan pengelolaan atau pelaporan keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prosedur. Dengan demikian penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi menurut peneliti akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan desa, hal ini didukung oleh peneliti terdahulu yang pernah dilakukan oleh (Rukmi Juwita,2013) tentang “ Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa” menyimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh oleh (Yuliana,2020) tentang “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa” menyimpulkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian Selanjutnya oleh (Resti Amelia, 2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa, hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah serta semakin baik penerapan standar informasi akuntansi maka akan semakin baik pula dalam kualitas laporan keuangan desa.

Berdasarkan hal diatas, penulis berasumsi bahwa akan terjadi hal yang sama di pemerintahan desa, yang mana penelitian ini sebagaimana yang telah disebutkan diatas akan dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan Arjasari, dengan menganalisis bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

**II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah**

Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun menurut Bastian (2010) Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Rachmat (2010:19) Akuntansi Pemerintah merupakan sistem pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan yang bersifat kuantitatif mengenai keuangan yang berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.

Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah dengan tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Adapun indikator dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut menurut Indra Bastian (2010) :

1. Regulasi
2. Sumber daya manusia
3. Sistem dan sarana pendukung

**2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Mariana (2017:32) Sistem Informasi Akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formuir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebaga alat pengembilan keputusan manajemen. Sedangkan menurut Wilkinson dalam Musa (2019) bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan tindakan koordinasi sumber daya (*data, materials, equipment, suppliers, personal, and funds*) yang dapat menghasilkan sebuah keluaran-keluaran berupa data ekonomi dikonversi sampai menjadi informasi yang berguna bagi pihak-pihak berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan maupun aktivitas suatu entitas.

Dari definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengolah data yang berkaitan dengan informasi akuntansi/keuangan yang diberguna bagi pihak-pihak berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Adapun indikator Sistem Informasi Akuntansi menurut Musa (2019:4) antara lain :

1. *Relevance*
2. *Accuracy*
3. *Completeness*
4. *Broadscope*
5. *Timelines*
6. *Aggregation*
7. *Integration*

**2.1.3 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Poll (2008) dalam Kusumangdiah Retno bahwa kualitas merupakan kemampuan mencapai tujuan dan penyesuaian kebutuhan antara pengguna dan pelanggan Setiap pemakai saling berlainan dalam memahami, merasakan, dan menilai apa itu kualitas.

Dalam Websters New World Dictionary of Ameica English 1994 (Djoko Adi, 2020:3), Definisi umum kualitas :

1. *The degree of excellence a thing possese*
2. *Excellence superiority*
3. *Rare position, capacity, role*
4. *High social position*

Keempat definisi umum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas mengisyaratkan suatu kesempurnaan atau suatu kedudukan yang lebih tinggi dari segmen lainnya. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas merupakan tingkat baik atau tidaknya sesuatu yang dihasilkan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dan kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Munawair dalam Wastam (2019:2), laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) bahwa Laporan Keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah suatu penyajian laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan yang berisi tentang informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh penggunanya.

Adapun indikator kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah antara lain :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat digambarkan skema paradigma penelitan sebagai berikut :

**Sistem Informasi Akuntansi**

**(X2)**

**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

**(X1)**

**Kualitas Laporan Keuangan**

**(Y)**

**Gambar 1**

**Bagan Paradigma Penelitian**

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangkan pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari.
2. Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari.

**III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

**3.1 Objek Penelitian**

Sesuai judul penelitian yang dipilih maka objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi.

**3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

* + 1. **Populasi dan Sempel**

**3.2.1.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang berjumlah 11 (sebelas) desa yaitu:

1. Desa Ancolmekar
2. Desa Arjasari
3. Desa Baros
4. Desa Batukarut
5. Desa Lebakwangi
6. Desa Mangunjaya
7. Desa Mekarjaya
8. Desa Patrolsari
9. Desa Pinggirsari
10. Desa Rancakole
11. Desa Wargaluyu

**3.2.1.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul refresentatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunkan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai desa mulai dari pimpinan (kepala desa) sebagai pengambil kebijakan, sampai bawahan yang mengetahui dan terlibat langsung dengan keuangan yaitu :

**Tabel 1**

**Sampel Penelitian (Responden)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa / Kelurahan** | **Kepala Desa / Lurah** | **Sekretaris Desa / Kelurahan** | **Kaur / Kasi** | **Jumlah** |
| 1 | Desa Ancol mekar | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Desa Arjasari | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Desa Baros | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Desa Batukarut | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Desa Lebakwangi | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Desa Mangunjaya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Desa Mekarjaya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Desa Patrolsari | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Desa Pinggirsari | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Desa Rancakole | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Desa Wargaluyu | 1 | 1 | 3 | 5 |
|  | **Total Sampel** |  | | | **55** |

Sumber : Hasil Observasi / Pra survey

Berdasarkan data diatas, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 55 orang responden yang tersebar pada pemerintahan desa di Wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Data diatas sesuai yang tertera pada struktur organisasi desa dan kelurahan, kecuali para staf desa yang tidak termasuk dalam kategori responden.

**3.2.2 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. **Analisis Linear Regresi Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen () dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel indepeden mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : “Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel indepenen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

1. **Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan.

Adapun untuk mengetaui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Koefisien Korelasi Dan Taksirannya**

|  |  |
| --- | --- |
| **Interval Koefisien** | **Tingkat Hubungan** |
| 0,00 - 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 - 0,399 | Rendah |
| 0,40 - 0,599 | Sedang |
| 0,60 - 0,799 | Kuat |
| 0,80 - 1,000 | Sangat Kuat |

Sumber : Sugiyono (2017:231)

1. **Koefisien Determinasi**

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebgai berikut:

KD = R2.100 %

Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R² = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.
3. **Pengujian Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2017:230) mendefinisikan bahwa : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka Ho tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Ha menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

1. **Uji Signifikan Parsial (Uji t)**

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan dengan .

Setelah menghitung nilai thitung selanjutnya membuat kesimpulanmengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara thitung dan ttabel dengan ketentan uji sebagai berikut:

1. Jika thitung> ttabel pada α = 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh).
2. Jika thitung< ttabel pada α = 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPPS*), jika nilai sig < α = 0,05 maka Ho ditolak.
4. **Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel yaitu:

1. Jika Fhitung> Ftabel pada α = 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima (berpengaruh).
2. Jika Fhitung< Ftabel pada α = 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPPS*), jika nilai sig < α = 0,05 maka Ho ditolak.
4. **Menentukan Taraf Signifikansi**

Hasil analisis dan pengujian hipotetsis tingkat signifikannya adalah 0,05% (α =0,05) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Hasil Penelitian**

**4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3**

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 2368.521 | 3911.120 |  | .606 | .547 | |
| X1 | .516 | .074 | .677 | 6.974 | .000 | |
| X2 | .173 | .082 | .204 | 2.099 | .041 | |
| a. Dependent Variable: Y | | | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

**Y = 2368,521 + 0,516 X1 + 0,173 X2**

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta pada persamaan sebesar 2368,521 menjelaskan jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol maka kinerja pemerintahnya adalah sebesar 2368,521.
2. Koefisien regresi linear berganda untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah anggaran (X1) bernilai positif sebesar 0,516 menunjukan perubahan nilai kinerja pemerintah (Y) jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah meningkat sebesar satu persen pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan, maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah sebesar 0,516 pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan.
3. Koefisien regresi linear berganda untuk Sistem Informasi Akuntansi (X2) bertanda positif sebesar 0,173 menunjukan perubahan nilai kinerja pemerintah (Y) jika Sistem Informasi Akuntansi meningkat sebesar satu persen pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan, maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah sebesar 0,173 pada saat variabel lain tidak mengalami perubahan.

**4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi**

**Tabel 4**

**Hasil Analisis Korelasi Pearson**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Correlations** | | | | |
|  | | X1 | X2 | Y |
| X1 | Pearson Correlation | 1 | .525\*\* | .784\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .000 | .000 |
| N | 55 | 55 | 55 |
| X2 | Pearson Correlation | .525\*\* | 1 | .559\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .000 |  | .000 |
| N | 55 | 55 | 55 |
| Y | Pearson Correlation | .784\*\* | .559\*\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .000 | .000 |  |
| N | 55 | 55 | 55 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

**Tabel 4**

**Hasil Analisis Korelasi Ganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summary** | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .803a | .645 | .631 | 4865.240 |
| a. Predictors: (Constant), X2, X1 | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

* 1. Korelasi antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Akuntansi Pemerintah Desa adalah sebesar 0,784. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60 – 0,799 atinya mempunyai hubungan kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintah akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Desa.
  2. Korelasi antara Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa adalah sebesar 0,559. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,40 – 0,559 artinya mempunyai hubungan yang sedang, karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Sistem Informasi Akuntansi akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Desa
  3. Korelasi ganda antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa adalah sebesar 0,803. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Keuangan secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh Kualitas Laporan Keuangan Desa.

**4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,645 yang menunjukan bahwa 64,5 % Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Informasi Akuntansi sedangkan sisanya sebesar 35,5% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

**4.1.4 Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan)**

1. **Uji t (Parsial)**

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

* Jika thitung < ttabel atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
* Jika thitung > ttabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

1. Pada tabel 3 diatas nilai thitung untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) adalah 6,974, sedangkan ttabel sebesar 1,674. Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kemudian pada kolom sig. diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
2. Pada tabel 3 diatas nilai thitung untuk Sistem Informasi Akuntansi (X2) adalah 2,099, sedangkan ttabel sebesar 1,674. Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kemudian pada kolom sig. diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).
   * + 1. **Uji F (Simultan)**

**Tabel 4.9**

**Hasil Perhitungan Uji F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANOVAa** | | | | | | |
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 2233724342.646 | 2 | 1116862171.323 | 47.184 | .000b |
| Residual | 1230869337.463 | 52 | 23670564.182 |  |  |
| Total | 3464593680.109 | 54 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Y | | | | | | |
| b. Predictors: (Constant), X2, X1 | | | | | | |

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

* Jika Fhitung < Ftabel atau probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
* Jika Fhitung > Ftabel atau probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung adalah 47,184 sedangkan nilai Ftabel diperoleh sebesar 3,18. Karena Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kemudian dari tabel ANOVAa diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

**4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari**

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Desa memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,784 yang artinya bahwa setiap kenaikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Desa sebesar 0,784 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,695 berada pada nilai korelasi antara 0,60 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Desa akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Desa Kecamatan Arjasari sebesar 53,0% . Kemudian hasil uji-t bahwa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa memiliki pengaruh yang signifikan karena thitung > ttabel (6,974 > 1,674), pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan HO, maka HO ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Menurut Zeyn (2011) Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Dan menurut Rukmi (2013) Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah, pengelolaan dana Desa akan semakin akuntabel dan transparan sehingga dana Desa dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Yusuf Komarudin,2014) dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dari hasil analisa mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, maka dapat diketahui bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, hal ini menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan sehingga hasil laporan keuangan berkualitas. Tetapi ada hasil penelitian yang tidak sesuai, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Bambang,2011), dengan judul penelitian Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Efektivitas pembangunan organisasi. Dengan hasil penelitian bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pembangunan pada suatu organisasi.

Peneliti sampai kepemahaman bahwa apabila untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan berkualitas serta pengelolaan dana Desa yang akuntabel dan transparan yaitu dengan upaya merenapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Desa akan meningkat. Namun demikian berdasarkan hasil analisis deskriptif Standar Akuntansi Pemerintah masih belum optimal diterapkan sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya Kualitas Laporan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Kecamatan Arjasari.

1. **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari**

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Desa memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,559 yang artinya bahwa setiap kenaikan Sistem Informasi Akuntansi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Desa sebesar 0,559 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,695 berada pada nilai korelasi antara 0,60 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Sistem Informasi Akuntansi akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara persial Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Desa Kecamatan Arjasari sebesar 11,4% . Kemudian hasil uji-t bahwa Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa memiliki pengaruh yang signifikan karena thitung > ttabel (6,974 > 1,674), pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan HO, maka HO ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi bahwa Sistem Informasi Akuntansi secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

Menurut Mariana (2017) Sistem Informasi Akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengembilan keputusan manajemen.Terdapat hasil penelitian yang sama sesuai yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Julia Prasisca, Rika Kharlina, Christina Yunita,2011) tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun hasil penelitian yang tidak sesuai yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Lukiman Renaldy,2014) dengan judul penelitian yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan penerapan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja individu.

Peneliti sampai kepemahaman bahwa dalam menciptakan suatu laporan keuangan dan mengolah data keuangan, Sistem Informasi Akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang Pemerintah Desa terutama dalam menjalankan pengelolaan atau pelaporan keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prosedur. Namun demikian berdasarkan hasil analisis deskriptif bahwa Sistem Informasi Akuntansi masih belum optimal dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan rendahnya Kualitas Laporan Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa Kecamatan Arjasari.

1. **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Arjasari**

Berdasarkan hasil verifikatif, bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Keuangan secara simultan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Kualitas Laporan Keuangan Desa. Hal ini ditunjukan dengan hasil koefisien korelasi ganda sebesar 0,803 berada pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan. Kemudian hasil perhitungan koefisien determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 64,5% memiliki pengaruh yang kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan hasil epsilon (ε) sebesar 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Desa Kecamatan Arjasari karena Fhitung > Ftabel (47,184 > 3,18) dan pada gambar kurva daerah penerimaan dan penolakkan HO bahwa Fhitung berada pada daerah penolakan, maka HO ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Sistem Informasi Akuntansi (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Y).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Resti Amelia,2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Desa, hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi Pemerintah serta semakin baik penerapan standar informasi akuntansi maka akan semakin baik pula dalam kualitas laporan keuangan Desa. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dalam Fikri (2015) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan. Sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatwaktuan.

Peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi apabila dikelola dengan baik maka akan menentukan Kualitas Laporan Keuangan Desa semakin baik karena hasil analisis menunjukkan adanya hubungan serta pengaruh yang positif dan signifikan

**V. Simpulan dan Saran**

**5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi Pemerintahandan kualitas laporan keuangan Desa memiliki hubungan searah yang sangat kuat dan signifikan, hal ini menunjukan bahwa secara parsial Penerapan standar akuntansibepengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Desa. Artinya setiap kenaikan Penerapan standar akuntansi akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Desa begitupun sebaliknya, setiap penurunan Standar akuntansi pemerintah akan diikuti oleh penurunan Kualitas laporan Keuangan Desa.
2. Sistem Informasi akuntansi dan Kualitas laporan Keuangan Desa memiliki hubungan searah yang sangat kuat dan signifikan, hal ini menunjukan bahwa secara parsial sistem informasi akuntansi bepengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Desa. Artinya setiap kenaikan sistem informasi akuntansi akan diikuti oleh kenaikan Kualitas laporan Keuangan Desa begitupun sebaliknya, setiap penurunan sistem informasi akuntansi akan diikuti oleh penurunan Kualitas laporan Keuangan Desa.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintahdan sistem informasi akuntansi secara simultan memilki hubungan searah, sangat kuat dan signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan Desa. Artinya jika penerapan standar akuntansi pemerintahdan sistem informasi akuntansi sama-sama mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh kenaikan Kualitas laporan Keuangan Desa begitupun sebaliknya, jika penerapan standar akuntansi pemerintahdan sistem informasi akuntansi sama-sama mengalami penurunan, maka kualitas laporan Keuangan Desa pun akan mengalami penurunan.

**5.2 Saran**

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis terhadap pihak perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Kecamatan Arjasari mempunyai hubungan yang kuat bahwa setiap kenaikan Standar Akuntansi Pemerintah akan diikuti oleh kenaikan Kualitas Laporan Keuangannya, maka untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, Pemerintah Desa Kecamatan Arjasari harus meningkatkan penerapan dalam Standar Akuntansi Pemerintah yaitu dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan tentang standar akuntansi pemerintah untuk menambah wawasan agar penyajian laporan keuangan didesa berkualitas.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa mempunyai hubungan yang kuat bahwa setiap kenaikan sistem informasi akuntansi akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan, sistem informasi akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah desa terutama dalam menjalankan pengelolaan atau pelaporan keuangan, maka Pemerintahan Desa harus meningkatkan dalam sistem informasi akuntansi yaitu dengan melengkapi fasilitas seperti komputer, printer, dan jaringan internet agar dalam melaksanakan laporan keuangan lebih mudah dan mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan, serta dapat meminimalisir keterlambatan dalam pelaporan keuangan.
3. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa, perlunya peningkatan dalam standar akuntansi pemerintah hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa, adapun untuk sistem informasi akuntansi sangatlah penting untuk ditingkatkan kembali hal ini diperlukan dalam menunjang Pemerintah Desa terutama dalam menjalankan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

**DAFTAR PUSTAKA :**

Anna Mariana dkk, 2017. Sistem Informasi Akuntansi : Teori dan Praktikal. Surabaya : Perpustakaan Nasional.

Bambang, 2011. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Efektivitas Pembangunan Organisasi.

Djoko Adi, dkk. 2020. Pengendalian Kualitas . Surabaya : Scopindo.

Elvira Zeyn, 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, 2011

Fikri, M. Ali, Biana Adha Inapty, and Sri Panca Martiningsih. 2015. "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (Studi empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB)." Simposium Nasional Akuntansi 18 (2015): 5-7

Fransiska, dkk, 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kope-rasi Lister PT. PLN (persero) (Palembang : Jurnal Akuntansi)

Indra Bastian, 2010. Akutansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.

Luman, R., Penaru. 2016. Sistem Informasi Akuntansi , Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Kuntansi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu Karyawan. Jurnal Ilmu Akuntansi.

Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta : Andi.

Musa Yosep, Dewi . 2019. Kualitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Pada Entitas Sektor Publik. (Surabaya : Scopindo.

Rachmat, 2010. Akuntansi Pemerintahan. Bandung : Pustaka Setia.

Resti Amelia A. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa Diss. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Rukmi Juwita, 2013. Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Jurnal Trikonomika Volume 12, No.2, Desember 2013)

Wastam Wahyu, 2018. Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia,.

Yuliana Sueng , 2020. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai ( Jurnal Akuntansi Vol. 7 No.3 September 2020)

Yusup Komarudin , 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . Universitas Komputer Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Rencana Strategis Kecamatan Arjasari (Sumber : https://ppid.bandungkab.go.id Diunduh tanggal 24 April 2022 pukul 20:54)

KSAP (sumber http//www.ksap.org/sap/ diakses tanggal 20 juni 2022 pukul 10.00)